

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ijin-Nya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang merupakan dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 memuat isu-isu strategis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota selama Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini merupakan penjabaran kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 menyajikan tugas pokok dan fungsi, perencanaan strategik instansi, kerangka regulasi pada masing-masing program berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis dan dasar kebijakan dalam pelaksanaan program kesekretariatan Pemerintah Kota Banjarbaru dan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2022 yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini disusun berdasarkan pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah, sedang dan akan dijalankan, sehingga Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesekretariatan melalui pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2022.



Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022.

Banjarbaru, 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si.**  
**NIP. 19650928 199203 1 008**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	57
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	58
2.5 Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan .....	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	71
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	71
3.3 Program dan Kegiatan .....	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	75
BAB V PENUTUP .....	79

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang terhadap pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi antara lain pelayanan administrasi.

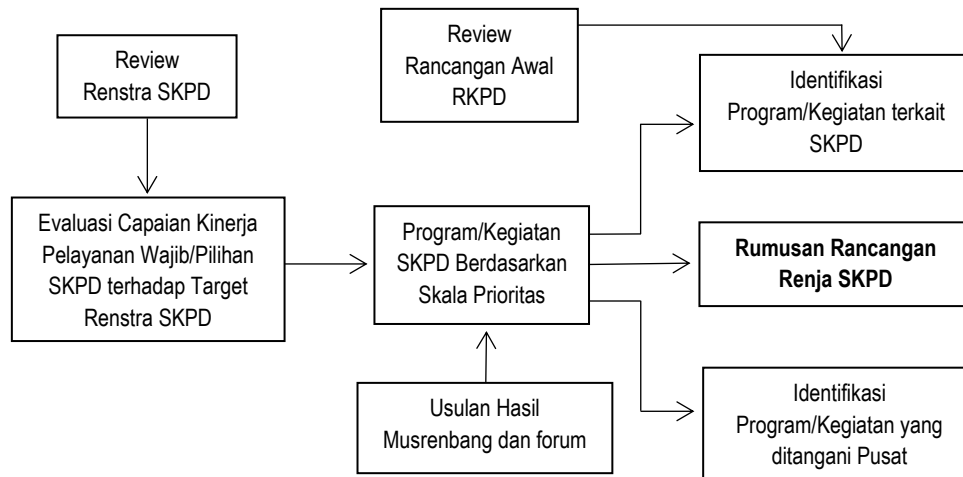
Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat wajib tersebut telah menetapkan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka semakin memperkuat kedudukan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang berfungsi dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan juga dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah.

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang tata kerjanya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah didasarkan kepada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Sebagai salah satu instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Sekretariat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2022 yang sumber pendanaannya dibiayai oleh APBD Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru maka disusunlah suatu rencana kerja berupa Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2022 yang menjadi acuan dan arahan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan. Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru

Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru, yang akan digunakan sebagai dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun 2022.



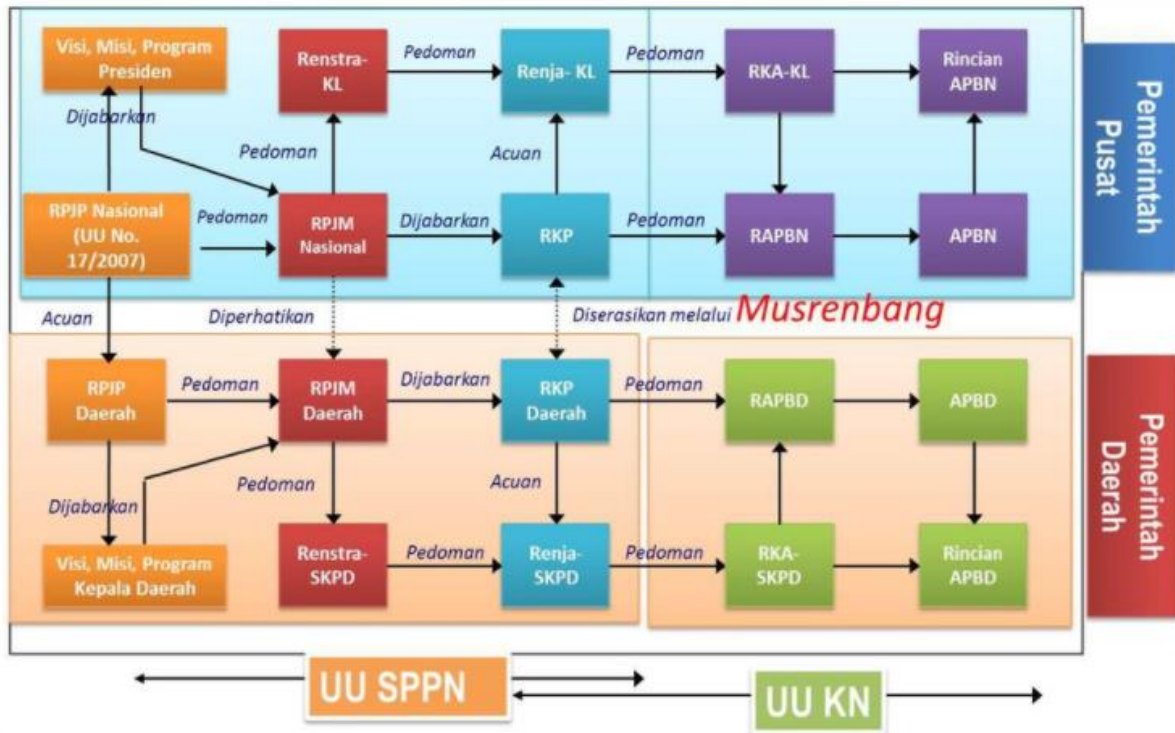
Gambar 1.1 Skema Penyusunan Renja SKPD

Dalam penyusunan Renja SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 sangat erat kaitannya dan tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; yang memasukan Kota Banjarbaru dalam Orde kedua. Penetapan RTRW Provinsi tersebut memberikan dukungan dan merupakan peluang bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan;
2. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2014-2034; dimana Renja-SKPD harus mengacu dan mempedomani RURTK tersebut sehingga pada pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari RURTK Banjarbaru Tahun 2014-2034;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarbaru; dimana Renja SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru merupakan penjabaran terhadap dokumen perencanaan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dimana Renja SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 harus saling mendukung antara satu dengan lainnya dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;
5. Rencana Kerja SKPD Provinsi yang terkait; dimana Renja SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus tetap mengacu dan mendukung Rencana Kerja SKPD Provinsi yang terkait lainnya (seperti : Sekretariat Provinsi) di Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Rencana Kerja Kementerian terkait; dimana Renja SKPD pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru harus mendukung dan menjabarkan Renja Kementerian terkait sesuai dengan bidang tugas yang terdapat pada SKPD.

Adapun gambaran hubungan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dengan dokumen perencanaan lainnya tercermin pada bagan berikut :



Gambar 1.2 Skema Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 536);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenkatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
  24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.



Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja SKPD ini di antaranya :

1. Terwujudnya integritas, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja SKPD Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru s/d tahun 2021.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru s/d Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARBARU</b>								
<b>SETDAKO - BAGIAN UMUM</b>								
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
<b>Nilai Evaluasi AKIP Setda</b>								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda tepat waktu					5 Dokumen	5 Dokumen	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
<b>Persentase proses penyelesaian temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti</b>								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Setda tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Tahun	1 Tahun	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda tepat waktu	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan Setda tepat waktu		n/a	n/a	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
<b>Persentase tingkat kehadiran pegawai</b>								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako	137 Stel 1 Paket	200 Set	200 Set	100%	87 Stel	87 Stel	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang/aset daerah</b>							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	282 OP	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	8 buah 9 unit	n/a	n/a	n/a	18 Jenis	15 Jenis	82,35%
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan		n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	2 Unit	100%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase usulan kepegawaian tepat waktu</b>							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkup Setdako	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Tersedianya jumlah tenaga keamanan	n/a	28 Orang	27 Orang	96,43%			
	Tersedianya jasa non PNS	85 Orang	83 Orang	83 Orang	100%			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	18 Buah	122 Unit	122 Unit	100%	122 Unit	122 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dalam kondisi baik	51 Buah	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur dalam kondisi baik	12 Bulan	1 Jenis	1 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	9 Jenis	9 Jenis	100%
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Terpeliharanya rutin/berkala rumah jabatan	n/a	n/a	n/a	n/a			
<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>							
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN HUMAS &amp; PROTOKOL</b>								
Layanan Hubungan Media	Cakupan layanan hubungan kerjasama dengan media	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku</b>							
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan acara kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	325 Kegiatan	282 Kegiatan	86,77%	325 Kegiatan	342 Kegiatan	105%
	Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan acara pemerintah daerah berupa penerimaan kunjungan kerja pejabat	35 Kali	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan	100%	n/a	n/a	n/a	275 Kegiatan	498 Kegiatan	181,08%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah acara kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diliput dan didokumentasikan	12 Bulan	500 kegiatan	490 Kegiatan	98%	550 kegiatan	349 Kegiatan	63,46%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN ORGANISASI</b>								
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP</b>							
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Jumlah dokumen analisa jabatan dan evaluasi jabatan	28 Dokumen	25 Dokumen	28 Dokumen	112%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah pembinaan penyelenggaraan RB SKPD	1 Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Jumlah pembinaan penyelenggaraan SAKIP SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a			
	Jumlah penilaian budaya kerja	n/a	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah LKJ IP yang tersusun	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SKPD yang mempunyai SOP	n/a	5 SKPD	5 SKPD	100%	5 SKPD	11	220%
	Jumlah produk hukum	n/a	1 Peraturan/Keputusan Walikota	1 Peraturan/Keputusan Walikota	100%	2 Peraturan/Keputusan	1 Peraturan/Keputusan	50%
	Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	n/a	5 SKPD	5 SKPD	100%	5 SKPD	32 SKPD	640%
	Nilai IKM Kota	Sangat Baik	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	102%
	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	81,00 (Hijau)	81% (Hijau)	81% (Hijau)	100%	90% (Hijau)	91,97% (Hijau)	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realiasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>							
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pertemuan dalam rangka dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan	5 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	4 Kali	5 Kali	120%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	100%	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	100%
	Jumlah peserta rakor bulanan Camat dan Lurah	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	100%	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	100%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial</b>							
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan haji	1 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
	Jumlah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kali	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%			
	Jumlah pelaksanaan Safari/Silaturahmi Ramadhan	6 Kali	13 Kali	10 Kali	76,92%			
	Jumlah pelaksanaan Takmir Ramadhan	n/a						
	Jumlah pelaksanaan Tali Asih petugas kebersihan rumah ibadah	1 Tahun	2 Kali	2 Kali	100%			
	Jumlah petugas masjid Agung Al Munawwarah	1 Kali	n/a	n/a	n/a			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah silaturahmi dan pengembangan sosial budaya	1 Kali	80 Kegiatan	80 Kegiatan	100%	68 Kali	68 Kali	100%
	Pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas netra	6 Kali						
	Jumlah pembinaan dan pengembangan UKS di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	1 Kali	4 Kali	0	0%	4 Kali	0	0%
	Jumlah evaluasi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi	n/a	n/a	n/a		2 Kali	1 Kali	50%
	Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan terhadap keberadaan anak yatim non lembaga di Kota Banjarbaru	n/a	n/a	n/a	n/a			
	Jumlah silaturahmi pemberdayaan masyarakat	n/a	3 Kali	1 Kali	33,33%	3 Kali	0	0%
	Bansos PERTUNI DPC Kota Banjarbaru	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Tahun	1 Tahun	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya bantuan sosial santunan kematian	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	800 Ahli Waris	474 Ahli Waris	59,2%
	Jumlah sosialisasi peraturan, monitoring evaluasi bantuan sosial dan hibah	n/a	2 Kali	2 Kali	100%	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,6%
	Jumlah sosialisasi Peraturan Walikota tentang rukun kematian dan bimtek penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah	n/a	2 Kali	2 Kali	100%	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%
	Tersedianya bantuan sosial kelompok masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Tahun	0	0%
	Tersedianya hibah kelompok masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	23	19	82,6%
<b>SETDAKO- BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGARARIAAN</b>								
<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi</b>							
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti	4 Kali	40 Naskah	30 Naskah	75%	100%	100%	100%
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase penegasan tata batas wilayah</b>							
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah Pemko	100%	16 Kali	5 Kali	31,25%	20 kali	24 Kali	100%
	Jumlah dokumen perubahan sertifikat tanah masyarakat yang menghibahkan tanah	n/a	150 sertifikat	10 sertifikat	6,67%	10 sertifikat	2 sertifikat	20%
	Pembuatan patok pengamanan tanah	n/a	10 buah	10 buah	100%	10 buah	0	0%
	Pembuatan papan nama pengamanan tanah	n/a	10 buah	10 buah	100%	6 buah	6 buah	100%
	Persentase penegasan tapal batas antar kabupaten	n/a	25 buah	0	0%	25 buah 7 kelurahan	24 buah	96%
	Persentase penyusunan peta nama rupa bumi	n/a	1 Dokumen	0	0%	1Dokumen	0	0%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN HUKUM</b>								
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah</b>							
	<b>Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Perundang-Undangan dan Kebutuhan Masyarakat</b>							
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah prdouk hukum yang tersusun:							
	Jumlah raperda yang tersusun	6 Raperda	12 Raperda	12 Raperda	100%	7 Raperda	17 Raperda	292,5%
	Evaluasi Perda	6 Perda	12 Perda	8 Perda	66,67%	7 Perda	15 Raperda	
	Fasilitasi Perwali	75 Perwali	15 Perwali	77 Perwali	513%	15 Perwali	82 Perwali	
	Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik	100%	2 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pengelolaan dokumentasi produk hukum serta informasi hukum :							
	- Media cetak	n/a	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	58,33%
	- Sosialisasi penyuluhan hukum	n/a	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	
	- Pembinaan kadarkum dan kelurahan sadar hukum	n/a	5 Kali	3 Kali	60%	3 Kali	4 Kali	
	Website JDIH	n/a	1 Website	1 Website	100%	1 Website	1 Website	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang terfasilitasi	7 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	100%	7 Perkara	7 Perkara	100%
	Rencana Aksi Nasional HAM dan penilaian kota peduli HAM	1 Kali	1 Kali	0	0%	1 Kali	1 Kali	100%

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realisasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>								
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian</b>							
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kajian Investasi	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Evaluasi Monitoring pengelolaan BLUD	n/a	n/a	n/a	n/a	11 Laporan	11 Laporan	100%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan inflasi daerah Kota Banjarbaru	12 Eksemplar	4 Laporan	0	0%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Jumlah rapat koordinasi	10 Kali	n/a	n/a	n/a	8 Kali	8 Kali	100%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah rapat koordinasi	4 Kali	8 Kali	1 Kali	12,5%	8 Kali	6 Kali	75%
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan</b>							
	<b>Jumlah perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota</b>							
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah kemitraan pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota	n/a	4 perusahaan	0	0%	4 perusahaan	0	0%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan	4 Kali	4 Kali	2 Kali	50%	2 Kali	2 Kali	100%
	Jumlah dokumen data informasi bahan kebijakan	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Tim sinergi optimalisasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan	n/a	5 Bulan	10 Bulan	125%	5 Bulan	5 Bulan	100%
	Jumlah pengendalian paket pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	47 Paket Pekerjaan	47%	50 Paket Pekerjaan	50 Paket Pekerjaan	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja (Renstra SKPD 2017-2021) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD tahun (2020)	Realiasi Renja SKPD tahun (2020)	Tingkat Realiasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>SETDAKO- BAGIAN PENGADAAN BARANG &amp; JASA</b>								
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa melalui bagian PBJ</b>							
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD yang terlayani dalam informasi dan konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	44 SKPD	40 konsultasi	32 konsultasi	80%	n/a	n/a	n/a
	Jumlah evaluasi dan pelaporan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah	44 SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	n/a	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	7 Kali Rapat	7 Kali Rapat	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Adapun untuk pemeringkatan berdasarkan kategori capaian kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s/d 100%	Baik ( B )
3	55 % s/d 75 %	Cukup ( C )
4	Kurang dari 55 %	Kurang ( K )

Sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan tugas dan fungsi kesekretariatan yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat melalui hasil evaluasi kinerja kegiatan yang diperoleh dari hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang implementasinya ditunjukkan dengan indikator pencapaian sasaran.

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pencapaian IKU Dinas Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 yang terdiri 6 (enam) sasaran Strategis dan terdiri dari 7 (tujuh) Indikator dengan menyajikan Perjanjian Kinerja awal yang telah disusun dan disajikan secara lengkap dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 (PK Awal 2021)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	Sudah dilaksanakan	Hingga sampai saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak yang berwenang, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian LPPD Tahun 2018 yaitu skor 3,2921 dengan predikat Sangat Tinggi
2	Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%  (11 Perda)	54,54%  (6 Perda)	54,54%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Hijau	**Ket : Realisasi/ capaian belum bisa diukur karena tergantung pihak ketiga	-
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	Sangat Baik		-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	10	*Ket : Realisasi/ capaian belum bisa diukur karena tergantung pihak ketiga	-
5	Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	80%	100%	100%
6	Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah Antar Kelurahan dan atau Kecamatan	2 Wilayah (24 Patok)	23 Patok	95,83%

Pencapaian IKU baru Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 yang terdiri 7 (tujuh) sasaran Strategis dan terdiri dari 7 (tujuh) Indikator ini dengan menyajikan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Renstra baru yang telah disusun dan disajikan secara lengkap dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2021 (PK Perubahan 2021) \*PK yang diulas

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	n/a	-
2	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%
5	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	136,36%	136,36%
7	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	100%	100%	100%



**SASARAN KINERJA :**

- *Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan*

**INDIKATOR KINERJA :**

- Nilai LPPD

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun alasan pemilihan indikator kinerja Nilai LPPD adalah untuk menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Tabel 2.5 Tabel Capaian Nilai LPPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Nilai LPPD	Nilai	Sedang	Sudah dilaksanakan	Hingga sampai saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak yang berwenang, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian LPPD Tahun 2018 yaitu skor 3,2921 dengan predikat Sangat Tinggi

Indikator nilai LPPD berdasarkan target yang telah ditentukan pada tahun 2021 yaitu, kategori Tinggi dengan Skor Kinerja 3.47 sampai dengan 4.20 yang tertuang dalam Permendagri 18 Tahun 2020.

Hingga sampai dengan saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak yang bewenang, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian LPPD pada Tahun 2018 yaitu dengan perolehan Skor Kinerja 3,2921 predikat Sangat Tinggi. Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah di ukur melalui evaluasi capaian realisasi indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama

LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (denga bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%).

Adapun data dari nilai LPPD tersebut yaitu berupa sertifikat piagam penghargaan :



## II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

### a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 2.6 Tabel Capaian Nilai LPPD Tahun 2019, 2020, 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,30)	111%	Sangat Tinggi (3,2921)	110,10 %	n/a	-

Belum ada perbandingan nilai LPPD pada kinerja dua tahun terakhir karena hingga sampai dengan saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak yang bewenang, sehingga capaian kinerja yang dapat disampaikan adalah capaian LPPD pada Tahun 2018 yaitu dengan perolehan Skor Kinerja 3,2921 predikat Sangat Tinggi.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (dengan bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%).

A. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan (dengan bobot 70% dari 95%) dan pada tataran Pelaksana Kebijakan (dengan bobot 30% dari 95%).

- I. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek.
- II. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM.

Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan (dengan bobot 40% dari 70%) yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
3. Penataan kelembagaan daerah (10% ).
4. Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
5. Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
6. Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
7. Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%)

Penilaian aspek capaian kinerja (dengan bobot 60% dari 70%) dengan rincian:

1. Untuk urusan wajib bobotnya 80% dari 60% terdiri dari 78 Indikator Kinerja Kunci (IKK):
  - a. Pendidikan (20%)
  - b. Kesehatan (15%)
  - c. Lingkungan Hidup (5%)
  - d. Pekerjaan Umum (5%)
  - e. Koperasi dan UKM (2%)
  - f. Perumahan (4%)
  - g. Ketahanan Pangan (2%)
  - h. Kependudukan dan Catatan Sipil (5%)
  - i. Tenaga Kerja (2%)
  - j. Perencanaan Pembangunan (5%)
  - k. Kepemudaan dan Olahraga (2%)
  - l. Penanaman Modal (2%)
  - m. Tata Ruang (3%)
  - n. Otonomi Daerah (2%)

- o. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%)
  - p. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (2%)
  - q. Perhubungan (2%)
  - r. Komunikasi dan Informatika (2%)
  - s. Pertanahan (1%)
  - t. Kesatuan Bangsa dan Politik (2%)
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
  - v. Sosial (3%)
  - w. Budaya (3%)
  - x. Statistik (1%)
  - y. Kearsipan (2%)
  - z. Perpustakaan (2%)
2. Untuk urusan pilihan bobotnya 20% dari 60% terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan :
- a. Kelautan dan Perikanan (12,5%)
  - b. Pertanian (20%)
  - c. Kehutanan (12,5%)
  - d. Energi dan SDM (12,5%)
  - e. Pariwisata (12,5%)
  - f. Industri (12,5%)
  - g. Perdagangan (12,5%)
  - h. Transmigrasi (5%)
- B. Penilaian terhadap indeks kesesuaian materi dengan bobot 5% terdiri dari :
- a. Desentralisasi (65%)
  - b. Tugas Pembantuan (20%)
  - c. Tugas Umum Pemerintahan (10%)
  - d. Kelengkapan Laporan (5%)

Hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2019 dan tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum dapat disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Namun dapat disampaikan untuk hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2018 kota Banjarbaru secara Nasional telah ditetapkan dalam bentuk Piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 3,2921 dan status kinerja sangat Tinggi, jika

dibandingkan dengan tahun 2017 Terjadi Peningkatan dengan skor 3.0546 dan status kinerja Sangat Tinggi.

### III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.7. Target RPJMD dan Nasional Nilai LPPD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1	Nilai LPPD	n/a	Sangat Tinggi	-

Belum dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional karena hingga sampai dengan saat ini capaian kinerja belum diumumkan oleh pihak yang bewenang.

### IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target nilai LPPD adalah dengan:

- 1) Melaksanakan seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat kinerja makro, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
- 2) Melaksanakan tugas pembantuan baik tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dan pemerintah pusat maupun pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi;
- 3) Melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal;
- 4) Kelengkapan data dukung IKK;
- 5) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja;

Perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan :

- a. Belum melakukan reuiu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
- b. Kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala belum dilaksanakan

### V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terutama dari segi penganggaran telah dilakukan

efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 16.63%. ( $100\% - 86,37\% = 16,63\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 86,37%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Nilai LPPD masih belum keluar. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 331.953.200 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 286.702.700. Anggaran tahun 2021 digunakan untuk persiapan penilaian LPPD tahun 2022 serta membantu dalam pembuatan dokumen LPPD tahun 2021 terlepas dari adanya penilaian dari Kemerntrian Dalam Negeri ataupun tidak..

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Program Yang Mendukung Nilai LPPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

**SASARAN KINERJA :**

- **Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD**

**INDIKATOR KINERJA :**

- **Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP/ RB yang selesai ditindak lanjuti**

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun alasan pemilihan indikator kinerja Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti adalah menunjukkan perbaikan yang dilaksanakan terhadap kelemahan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kota dalam mendukung pencapaian kinerja Walikota berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Perbaikan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan SAKIP dan RB SKPD diukur berdasarkan tindaklanjut terhadap rekomendasi penilaian SAKIP dan RB Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh evaluator Kementerian PAN dan RB.

Pada tahun 2021 capaian kinerja meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD dengan indikator persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Capaian Pengendalian SAKIP/RB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	%	100	100	100 Baik

Indikator persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang ditindaklanjuti berdasarkan target 100%, telah terealisasi 100% dengan katagori BAIK.

Tabel 2.10 Hasil Monev SAKIP Tahun 2021

NO.	DOKUMEN	PEMENUHAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	RENJA SKPD 2021	32 SKPD		
2.	PERJANJIAN KINERJA 2021	32 SKPD		
3.	RENCANA AKSI 2021 :			
	a. SKPD	32 SKPD		
	b. KEGIATAN	32 SKPD		
4.	LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN TAHUN 2021	32 SKPD		
5.	LAPORAN MONEV KINERJA SKPD TAHUN 2021	32 SKPD		
6.	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA	32 SKPD		

Tabel 2.11 Hasil Monev RB Tahun 2021

NO.	DOKUMEN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	SK TIM REFORMASI BIROKRASI SKPD 2021	32 SKPD		
2.	SK TIM ASSESOR SKPD 2021	32 SKPD		
3.	RENCANA AKSI TIM REFORMASI BIROKRASI 2021	32 SKPD		
4.	MONITORING PELAKSANAAN TENCANA AKSI TIM RB TAHUN 2021	32 SKPD		
5.	KKE ASSESOR TAHUN 2021	32 SKPD		

## II. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2021 merupakan tahun ke 1 dalam pelaksanaan RENSTRA 2021-2026 dimana pelaksanaannya hanya beberapa bulan sejak ditetapkan. Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir (tahun 2019 dan 2020) dibandingkan dengan tahun 2021, sebagai berikut :



Tabel 2.12 Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir Pengelolaan SAKIP/RB

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100	n/a	100	n/a	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) sama dengan realisasi kinerja 100%, sedangkan capaian 2019 dan 2020 tidak dapat dihitung karena pada tahun tersebut belum ada target karena indikator persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti merupakan indikator baru.

### III. Perbandingan Kinerja Dengan Kabupaten / Kota / Propinsi

Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Pengelolaan SAKIP/RB dengan Kota Lain

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal - Sel
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	-	-	-	-	-

Perbandingan persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti dengan kabupaten/ Kota / provinsi lainnya tidak ada IKU yang sama.

#### IV. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.14 Target RPJMD &amp; Nasional Pengelolaan SAKIP/RB

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100	100	-

Realisasi Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra sama – sama 100%, hal ini bukan berarti target renstra pada tahun 2026 sudah tercapai, tapi karena target kinerjanya harus dijaga setiap tahunnya adalah 100%.

#### V. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- Melakukan sosialisasi melalui kegiatan pembinaan berkenaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD.
- Melakukan monitoring dan verifikasi melalui kegiatan pendampingan berkenaan pelaksanaan SAKIP dan RB SKPD.

Adapun hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah:

- Implementasi dari komitmen pada beberapa pimpinan SKPD masih kurang.
- SDM dari Tim SAKIP dan RB SKPD belum merata.
- Kualitas dari pemenuhan indikator penilaian masih harus ditingkatkan.

#### VI. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program / Kegiatan Menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 25,46%. ( $100\% - 74,54\% = 25,46\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 74,54%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti sebesar 100 %.

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 195.236.000 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 145.528.500

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15 Program Pendukung Pengelolaan SAKIP/RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

**SASARAN KINERJA :**

- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik SKPD**

**INDIKATOR KINERJA :**

- **Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti**

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun alasan dengan pemilihan indikator kinerja Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti adalah untuk mengukur secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, dengan indikator ini dapat dilihat kualitas pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarbaru dilihat dari perspektif masyarakat penerima layanan. Untuk konsistensi perbaikan pelaksanaan pelayanan pada SKPD yang memperhatikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2021 – 2026.

Pada tahun 2021 sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik SKPD dengan indikator persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.16 Capaian Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Publik SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	100% Baik

Indikator persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti berdasarkan target 100%, telah terealisasi 100% dengan Kategori BAIK.

Perbaikan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik SKPD diukur berdasarkan persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD

yang selesai ditindaklanjuti berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021.

Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan secara mandiri tahun 2021 terhadap 5 (lima) SKPD yang menjadi fokus yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 5 (lima) Kecamatan, 20 (duapuluh) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Puskesmas. Hasil tindak lanjut pengendalian kepatuhan standar pelayanan publik sebagai berikut :

Tabel 2.17 Hasil Tindak Lanjut Pengendalian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

No.	Variabel Penilaian	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Keterangan
1.	Standar pelayanan publik	5 SKPD	Dalam melaksanakan monitoring kepatuhan pelayanan publik ke 5 SKPD yaitu DPM&PTSP, Disdukcapil, RSD Idaman, BPPRD dan DAPD hasil rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh tiap SKPD yang di monitoring. Sedangkan ada 1 kecamatan dan 4 Kelurahan yang hasil tindaklanjutnya kurang maksimal sehingga menyebabkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik berada di tingkat sedang (Zona Kuning)
2.	Maklumat Pelayanan	5 Kecamatan	
3.	Sistem Informasi Pelayanan	20 Kelurahan	
4.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	10 Puskesmas	
5.	Pelayanan Khusus		
6.	Pengelolaan Pengaduan		
7.	Penilaian Kinerja		
8.	Visi, Misi dan Motto		
9.	Atribut		

## II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tabel 2.18 Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) sama dengan realisasi kinerja 100%, sedangkan capaian 2019 dan 2020 tidak dapat dihitung karena pada tahun tersebut belum ada target karena indikator persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti merupakan indikator baru.

### III. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.19 Target RPJMD & Nasional Pengendalian Pelayanan Publik SKPD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100	100	-

Realisasi persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra sama –sama 100%, hal ini bukan berarti target renstra pada tahun 2026 sudah tercapai, tapi karena target kinerjanya harus dijaga setiap tahunnya adalah 100%.

### IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti adalah dengan:

- a. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan pembinaan ,monitoring dan evaluasi berkenaan pelaksanaan pelayanan publik SKPD.
- b. Pemberian penghargaan berkenaan pelaksanaan pelayanan publik SKPD .

Adapun hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah :

- a. Komitmen bersama kepala SKPD terhadap peningkatan pelaksanaan pelayanan Publik.

## V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 7,4%. ( $100\% - 92,60\% = 7,4\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 92,60%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 302.020.500 Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 279.667.000.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20 Program Penunjang Pengendalian Pelayanan Pubik SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

**SASARAN KINERJA :**

- **Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat**

**INDIKATOR KINERJA :**

- **Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti**

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun Alasan pemilihan indikator dari Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti adalah untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi pengendalian dalam rangka pencegahan konflik toleransi keagamaan.

Capaian Kinerja sasaran tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat adalah :

Tabel 2.21 Capaian Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator sasaran Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dari target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi dengan nilai 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori capaian kinerja BAIK).

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi toleransi keagamaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi toleransi keagamaan}} \times 100\%$$



Tabel 2.22 Data Rekomendasi Toleransi Keagamaan Yang Ditindaklanjuti

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021	TRIWULAN IV		CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI	
1.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	497 tindak lanjut rekomendasi	100%	497	100%

Rekap data rekomendasi toleransi keagamaan yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23 Data Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Tahun 2021

NO.	DOKUMEN	PEMENUHAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN	474 BERKAS	-	TELAAHAN STAF PERSETUJUAN
2.	PERMOHONAN HIBAH KELOMPOK MASYARAKAT	23 BERKAS	-	SK WALIKOTA

## II. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.24 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada dikarenakan indikator kinerja baru.

### III. Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.25 Target RPJMD dan Nasional Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	n/a

Realisasi Indikator sasaran Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat di tahun 2021 adalah 100% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

### IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan indikator Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti dalam Kerukunan Berbasis Adat dan Agama karena adanya peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti dalam Kerukunan Berbasis Adat dan Agama adalah dengan:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan;
2. Selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak/SKPD yang terkait maupun instansi, stakeholder yang dapat memberikan masukan-masukan untuk program dan kegiatan yang mungkin dapat ditindaklanjuti;
3. Menggali informasi tentang perkembangan maupun realita keberagamaan di masyarakat.

Adapun hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah Komitmen bersama kepala SKPD terhadap peningkatan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

## V. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program / kegiatan menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 17,33%. ( $100\% - 82,67\% = 17,33\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 82,67%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp 5.542.285.981 Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 4.954.125.833.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26 Program Pendukung Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

**SASARAN KINERJA :**

- **Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian**

**INDIKATOR KINERJA :**

- **Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti**

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun Alasan pemilihan indikator dari Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti adalah untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan program kebijakan perekonomian daerah.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian adalah :

Tabel 2.27 Capaian Pengendalian Kebijakan Perekonomian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Kebijakan berkenan Meningkatkan kualitas Administrasi Perekonomian dan SDA Pada indikator Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian adalah 100%, telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori capaian kinerja BAIK).

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi tindaklanjut pelaksanaan program perekonomian}}{\text{Jumlah rekomendasi pelaksanaan program perekonomian}} \times 100\%$$

Data rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan program perekonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28 Data Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Perekonomian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021	TRIWULAN IV		CAPAIAN KINERJA
				TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya tindaklanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian selesai ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi tindaklanjut pelaksanaan program perekonomian			
			-Rapat TPID, UMKM dan BLUD (18 kali)	100%	9	72,22%
			-Monitoring TPID, UMKM dan BLUD (27 kali)	100%	11	81,48%

## II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tabel 2.29 Kinerja 2 Tahun Terakhir Pengendalian Kebijakan Perekonomian

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada dikarenakan indikator kinerja baru.

### III. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.30 Target RPJMD dan Nasional Pengendalian Kebijakan Perekonomian

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	n/a

Realisasi Indikator sasaran Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian di tahun 2021 adalah 100% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100 %. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konprekuensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD secara efektif dan efisien.

### V. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan :

- a) Terlaksananya kegiatan Monitoring BLUD sesuai target yang telah direncanakan;
- b) Rapat dan monitoring sudah terlaksana dengan SKPD terkait
- c) Laporan Triwulan TPID sudah dilaporkan ke TPIN pusat
- d) Rapat dan monitoring sudah terlaksana dengan SKPD terkait

Kegagalan :

- a) Kajian untuk tahun 2021 tidak terealisasi karena tidak ada penambahan untuk penyertaan modal baik dari PDAM dan Bank Kalsel.

### VI. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program / Kegiatan Menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Perekonomian dan Pembangunan terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 24,85%. ( $100\% - 75,15\% = 24,85\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 75,15%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti sebesar

100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp 148.405.000 Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 111.524.000.

Dari persentase di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31 Program Penunjang Pengendalian Kebijakan Perekonomian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	Program Perekonomian dan Pembangunan

**SASARAN KINERJA :**

- ***Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah***

**INDIKATOR KINERJA :**

- **Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah**

**A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Indikator ini dipilih agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dan melanggar asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan produk hukum daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah :

Tabel 2.32 Capaian Rancangan Produk Hukum Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100%	136,36%	136,36%

Pencapaian indikator prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dari target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi dengan nilai 136,36% dengan capaian kinerja sebesar 136,36% (kategori capaian kinerja BAIK SEKALI).

Dalam penyusunan produk hukum daerah pada tahun 2021 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Pada Tahun 2021 telah diundangkan sebanyak 15 perda dari target 11 perda. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja bisa di kategorikan **Baik Sekali (BS)**.



Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang telah dilakukan sinkronisasi}}{\text{Jumlah target produk hukum}} \times 100\%$$

Tabel 2.33 Rekap Jumlah Produk Hukum yang Telah Dilakukan Sinkronisasi Data

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021	KINERJA TAHUNAN sd BULAN DESEMBER 2021		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100 % (11 Perda)	15 Perda	136.36 %	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Berikut Rincian Peraturan Daerah yang ditargetkan :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, Sarana Hiburan Dan Fasilitas Lainnya
4. Kerjasama Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026
6. Retribusi Pelayanan Pemakaman
7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Penanaman Modal
9. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
10. Jaringan Utilitas
11. Prototype Bangunan Khas Daerah

Berikut Rincian Peraturan Daerah yang telah diselesaikan :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Retribusi Pemakaian Tempat Olah Raga, Sarana Hiburan Dan Fasilitas Lainnya
4. Kerjasama Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Penanaman Modal
8. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
9. Jaringan Utilitas
10. Prototype Bangunan Khas Daerah
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
12. Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
13. Retribusi Izin Trayek
14. Retribusi Pelayanan Pemakaman
15. Penanggulangan Bencana Daerah

## II.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tabel 2.34 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	136,36%	136,36%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) yaitu 2019 dan 2020 dilihat dari realisasi adalah melebihi dari capaian kinerja sebelumnya yaitu di kategori 136,36%.

### III. Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.35 Target RPJMD dan Nasional Rancangan Produk Hukum Daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1.	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	136,36%	100%	-

Realisasi Indikator sasaran mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2021 adalah 136,36% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100 %. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

### IV. Analisis Penyebab Keberhasilan

Karena adanya penambahan Propemperda dimana terdapat Raperda sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang harus segera dilaksanakan.

### V. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program / Kegiatan Menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 4,55%. ( $100\% - 95,45\% = 4,55\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 95,45%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah sebesar 136,36 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp 1.122.034.000 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 1.071.027.750.

Dari persentase diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36 Program Pendukung Rancangan Produk Hukum Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase Rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

**SASARAN KINERJA :*****Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa*****INDIKATOR KINERJA :****Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik****A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021****I. Realisasi Capaian Kinerja**

Adapun Alasan pemilihan indikator dari Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah agar kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa tertib administrasi agar pengadaan barang dan jasa terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta transparan.

Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah :

Tabel 2.37 Capaian PBJ Secara Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	100	90,14	90,14

Pencapaian indikator Meningkatkan Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dari target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi dengan nilai 90,14% dengan capaian kinerja sebesar 90,14% (kategori capaian kinerja **BAIK**).

Adapun rumus capaian yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan barang dan jasa secara elektronik}}{\text{Jumlah permohonan pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$$

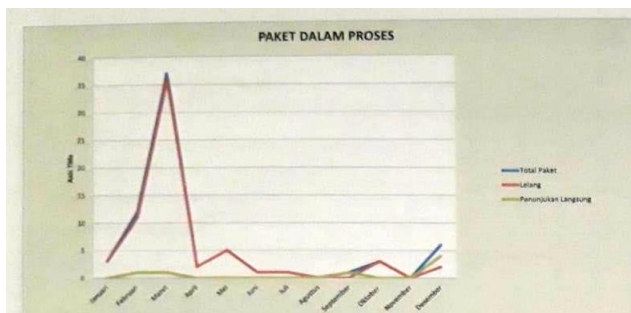
Berikut data rekap jumlah pengadaan barang dan jasa secara elektronik :

EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU PERIODE TAHUN 2021		
PAKET DITERIMA	:	71
PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI	:	0
PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN	:	0
PAKET GAGAL	:	2
PAKET SELESAI	:	69
<b>PENGADAAN BARANG</b>		
PENGADAAN BARANG	:	11
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	:	51
PENGADAAN JASA KONSULTANSI	:	9
PENGADAAN JASA LAINNYA	:	0
<b>TENDER</b>		
TENDER	:	64
PENUNJUKAN LANGSUNG	:	7
<b>SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP</b>		
SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP	:	40
SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP	:	0
TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP	:	125.827.738.663,00
TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP	:	70
<b>TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP</b>		
TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP	:	126.110.338.663,00
TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG	:	125.199.338.663,00
TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN	:	111.833.717.462,73
EFISIENSI HPS	:	13.365.621.200,27 <b>10,68%</b>

**Kendala Yang Sering Memperlambat Proses Pengadaan**

1. Kesalahan Penulisan Tujuan Surat
2. Belum Mengumumkan RUP/RUP Tidak Sesuai
3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
5. Dokumen Pengadaan bukan ditandatangani oleh PPK
6. Terlambat menyerahkan softcopy kepada Pokja

\*prosentase terhadap total RPP



## II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tabel 2.38 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	n/a	n/a	n/a	n/a	90,14%	90,14%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak ada dikarenakan indikator kinerja baru.

## III. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.39 Target RPJMD dan Nasional Pengelolaan PBJ Secara Elektronik

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1.	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	90,14%	100%	n/a

Realisasi Indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di tahun 2021 adalah 90,14% sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMD belum tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk target Nasional tidak ada.

## IV. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Adapun hambatan/kegagalan yang terdapat yaitu masih belum terlaksananya pengadaan barang/jasa pada metode penunjang langsung yang masih dilakukan secara manual, sehingga berdampak kepada pencatatan data kegiatan pengadaan hanya dapat dilaporkan melalui pelaporan secara manual dan itu berpengaruh terhadap rekapitulasi keseluruhan.

## V. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program / Kegiatan Menunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian program Perekonomian dan Pembangunan terutama dari segi penganggaran telah dilakukan efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah Target dikurang Total Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 14,96%. ( $100\% - 85,04\% = 14,96\%$ ).

Anggaran yang mendukung persentasi capaian kinerja sebesar 85,04%, sedangkan persentase capaian kinerja indikator sasaran Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebesar 100 %. Berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp 227.330.950 Sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp 193.332.450.

Dari persentase di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja berdasarkan indikator terlihat lebih besar hasil capaian kinerja dari pada anggaran yang mendukung.

Sedangkan program yang mendukung dalam capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.40 Program Penunjang Pengelolaan PBJ

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1.	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Program Perekonomian dan Pembangunan

### ➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, telah dilaksanakan program dan kegiatan yang di anggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 48.005.264.778 dengan realisasi sebesar Rp 41.078.705.719 (85,57%). Untuk mengetahui pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 terhadap penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.41 Tabel Analisis Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		CAPAIAN
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	n/a	-	331.953.200	282.508.500	87,51%
Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	195.236.000	145.528.500	74,54%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	302.020.500	279.667.000	92,60%
Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	5.992.247.985	4.734.438.833	79,00%
Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	148.405.000	111.524.000	75,15%

Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	136,36%	136,36%	1.122.034.000	1.071.027.750	95,45%
Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	100%	90,14%	90,14%	227.330.950	193.332.450	85,04%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat disajikan tabel berikut ini :

Tabel 2.42 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi tata pemerintahan	Nilai LPPD	Penataan Administrasi Pemerintahan	331.953.200	286.702.700	86,28
2	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	195.236.000	145.528.500	74,54
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	302.020.500	279.667.000	92,60

4	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	Fasilitasi Pengeloaan Bina Mental Spiritual	2.357.278.000	2.164.771.533	91,83
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.279.709.004	2.575.794.300	78,53
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	355.260.981	213.560.000	60,11
5	Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	35.200.000	7.316.000	20,78
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	92.029.400	85.552.400	92,96
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	21.175.600	18.655.600	88,10
6	Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	453.488.000	447.670.000	98,72
			Fasilitasi Bantuan Hukum	450.668.750	414.332.750	91,94
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	217.877.250	209.025.000	95,94

7	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95.895.500	72.431.500	75,53
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	131.435.450	120.900.950	91,99

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru melakukan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan perangkat daerah lainnya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Permasalahan secara umum yang dihadapi pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap unit kerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien;
4. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional ;
5. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
6. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi Daerah dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Kemampuan anggaran pembangunan yang masih tergantung ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang anggarannya masih terbatas sehingga pembangunan lebih diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya prioritas;
8. Kebijakan Pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

9. Adanya Pandemi Corona Virus Disease–2019 (Covid-19) yang mengakibatkan terhambatnya perencanaan dan pembangunan dengan pemotongan/ pemangkasan anggaran.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan. Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 2021 sebagaimana dilihat pada tabel 2.43.

Tabel 2.43 Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum											
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Setda	B	95,077,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Setda	B	106,322,000	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan Setda tepat waktu	2 Dokumen	18,070,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan Setda tepat waktu	2 Dokumen	18,070,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda tepat waktu	5 Dokumen	77,007,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjarbaru	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Setda tepat waktu	5 Dokumen	88,252,000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase proses penyelesaian temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	52,061,500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase proses penyelesaian temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	57,511,500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda tepat waktu	1 Dokumen	26,030,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Setda tepat waktu	1 Dokumen	31,480,750	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan Setda tepat waktu	4 Dokumen	26,030,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan Setda tepat waktu	4 Dokumen	26,030,750	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tingkat kehadiran pegawai	100%	195,525,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tingkat kehadiran pegawai	100%	327,525,000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banjarbaru	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako	73 Stel	195,525,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banjarbaru	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH serta Setdako	73 Stel	327,525,000	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	4,822,893,006	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	7,925,846,986	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	1,063,163,986	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	1,149,848,986	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	3,002,379,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	3,246,805,000	
			Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat	12 Bulan				Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat	12 Bulan		
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	225,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	225,000,000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	532,350,020	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	3,304,193,000	
14	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>24,510,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>2,277,724,000</b>	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	24,510,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	948,550,000	
			Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan				Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan		
			Terpeliharanya rutin/berkala rumah jabatan	12 Bulan				Terpeliharanya rutin/berkala rumah jabatan	12 Bulan		
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 Jenis				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	1 Jenis		
						Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	2 unit	1,329,174,000	
16	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase usulan kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4,247,549,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase usulan kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>4,385,537,000</b>	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkup Setdako	12 Bulan	1,857,996,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 Bulan	1,928,084,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	10 Orang	2,389,553,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banjarbaru	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	83 Orang	2,457,453,000	
			Tersedianya jumlah tenaga keamanan	33 Orang				Tersedianya jumlah tenaga keamanan	33 Orang		
			Tersedianya jasa non PNS	83 Orang				Tersedianya jasa kebersihan kantor	10 Orang		
19	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>1,971,288,147</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>3,490,288,147</b>	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	122 Unit	600,288,147	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	122 Unit	1,050,288,147	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah mobil jabatan yang terpeliharanya dalam kondisi baik	2 Unit	286,996,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banjarbaru	Jumlah mobil jabatan yang terpeliharanya dalam kondisi baik	2 Unit	286,996,000	
22	Pemeliharaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah mebeleur dalam kondisi baik	4 Jenis	12,000,000	Pemeliharaan Mebel	Banjarbaru	Jumlah mebeleur dalam kondisi baik	4 Jenis	12,000,000	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	9 Jenis	297,404,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banjarbaru	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	9 Jenis	422,404,000	
24	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	20 Jenis	774,600,000	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banjarbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	20 Jenis	1,718,600,000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	1 Tahun				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas secara rutin/berkala	1 Tahun		
			Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan				Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 Bulan		
			Terpeliharanya rutin/berkala rumah jabatan	12 Bulan				Terpeliharanya rutin/berkala rumah jabatan	12 Bulan		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1 25	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>120,000,000</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>150,000,000</b>	12
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Banjarbaru	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	12 Bulan	120,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Banjarbaru	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	12 Bulan	150,000,000	
Bagian Humas dan Protokol											
27	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2,238,705,500</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>2,238,705,500</b>	
28	Layanan Hubungan Media	Banjarbaru	Cakupan layanan hubungan kerjasama dengan media	12 Bulan	2,238,705,500	Layanan Hubungan Media	Banjarbaru	Cakupan layanan hubungan kerjasama dengan media	12 Bulan	2,238,705,500	
29	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>1,299,582,500</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>2,074,332,500</b>	
30	Fasilitasi Keprotokolan	Banjarbaru	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	271,659,500	Fasilitasi Keprotokolan	Banjarbaru	Persentase keprotokolan pimpinan yang terfasilitasi	100%	866,409,500	
			Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%				Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	100%		
31	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Banjarbaru	Cakupan pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Bulan	551,602,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Banjarbaru	Persentase fasilitasi komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	12 Bulan	581,602,000	
32	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Banjarbaru	Jumlah acara kedinasan yang diliput dan didokumentasikan	12 Bulan	476,321,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Banjarbaru	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasikan	12 Bulan	626,321,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi											
33	Penataan Organisasi		Nilai evaluasi AKIP	Nilai BB	780,228,000	Penataan Organisasi		Persentase cakupan pelaksanaan pengelolaan SAKIP / RB SKPD yang terverifikasi	Nilai BB	1,162,324,500	
34	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Banjarbaru	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan	10 Laporan	302,146,500	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Banjarbaru	Jumlah pembinaan kelembagaan SKPD yang dilaksanakan	10 Laporan	665,068,000	
			Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama	1 Dokumen				Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama	1 Dokumen		
			Jumlah dokumen analisa jabatan dan evaluasi jabatan	10 Dokumen				Jumlah dokumen analisa jabatan dan evaluasi jabatan	10 Dokumen		
35	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Banjarbaru	Jumlah SKPD yang mempunyai SOP	5 SKPD	282,845,500	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Banjarbaru	Jumlah ketentuan pelaksana pelayanan yang terfasilitasi.	5 SKPD	302,020,500	
			Jumlah produk hukum	3 Peraturan/Keputusan				Jumlah produk hukum terkait SOTK	3 Peraturan/Keputusan		
			Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	5 SKPD				Jumlah SKPD yang mempunyai Peta Proses Bisnis	5 SKPD		
			Nilai IKM Kota	Baik				Nilai IKM Kota	Baik		
			Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	90% (Hijau)				Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	90% (Hijau)		
36	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	Jumlah pembinaan penyelenggaraan RB SKPD	4 Laporan	195,236,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	Jumlah pembinaan RB yang dilaksanakan	4 Laporan	195,236,000	
			Jumlah pembinaan penyelenggaraan SAKIP SKPD	4 Laporan				Jumlah pembinaan SAKIP yang dilaksanakan	4 Laporan		
			Jumlah penilaian budaya kerja	1 Laporan				Jumlah SKPD yang dinilai budaya kerjanya	1 Laporan		
			Jumlah LKJ IP yang tersusun	1 Laporan				Jumlah LKJIP SKPD yang tersusun	1 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Pemerintahan											
37	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>852,291,700</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>928,791,700</b>	
38	Penataan Administrasi Pemerintahan	Banjarbaru	Jumlah pertemuan dalam rangka dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan	4 Kali	331,953,200	Penataan Administrasi Pemerintahan	Banjarbaru	Jumlah movev pelaksanaan urusan pemerintah bidang dukcapil, kesbangpol, trantib dan linmas yang dilaksanakan	4 Kali	331,953,200	
			Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	1 Kali				Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	1 Kali		
39	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Banjarbaru	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	197,500,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Banjarbaru	Jumlah koordinasi kewilayahan kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	5 Kecamatan/ 20 Kelurahan	274,000,000	
40	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Banjarbaru	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah	2 Kali	322,838,500	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Banjarbaru	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan SPM yang dilaksanakan	2 Kali	322,838,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Kesejahteraan Rakyat											
41	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100%	5,542,285,981	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	100%	5,992,247,985	
42	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Banjarbaru	Pelaksanaan peribadatan keagamaan	1 Tahun	2,282,278,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Banjarbaru	Jumlah koordinasi berkenaan peribadatan dan keagamaan yang dilaksanakann	1 Tahun	2,357,278,000	
			Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kegiatan				Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kegiatan		
			Pelaksanaan Ibadah Haji	2 Kali				Pelaksanaan Ibadah Haji	2 Kali		
			Pelaksanaan Tali Asih petugas kebersihan rumah ibadah	2 Kali				Pelaksanaan Tali Asih petugas kebersihan rumah ibadah	2 Kali		
			Pelaksanaan Safari/Silaturahmi Ramadhan	6 Kali				Pelaksanaan Safari/Silaturahmi Ramadhan	6 Kali		
			Petugas masjid Agung Al Munawwarah	1 Tahun				Petugas masjid Agung Al Munawwarah	1 Tahun		
			Pelaksanaan Takmi Ramadhan	10 Kali				Pelaksanaan Takmi Ramadhan	10 Kali		
			Hibah Organisasi Kelompok	1 Tahun				Hibah Organisasi Kelompok	1 Tahun		
			Hibah Kelompok Masyarakat	1 Tahun				Hibah Kelompok Masyarakat	1 Tahun		
43	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	Jumlah silaturahmi dan pengembangan sosial budaya	2 Kali	2,904,747,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	2 Kali	3,279,709,004	
			Pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas netra	54 Kali				Pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas netra	54 Kali		
			Jumlah pembinaan dan pengembangan UKS di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	4 Kali				Jumlah pembinaan dan pengembangan UKS di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	4 Kali		
			Jumlah sosialisasi peraturan, monitoring evaluasi bantuan sosial dan hibah	3 Kegiatan				Jumlah sosialisasi peraturan, monitoring evaluasi bantuan sosial dan hibah	3 Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sosialisasi peraturan Walikota tentang rukun kematian & bimtek penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah	3 Kegiatan				Jumlah sosialisasi peraturan Walikota tentang rukun kematian & bimtek penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah	3 Kegiatan		
			Bansos santunan kematian	1 Tahun				Bansos santunan kematian	1 Tahun		
			Bansos PERTUNI DPC Kota Banjarbaru	1 Tahun				Bansos PERTUNI DPC Kota Banjarbaru	1 Tahun		
			Hibah kelompok masyarakat	1 Tahun				Hibah kelompok masyarakat	1 Tahun		
44	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah evaluasi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi	1 Kali	355,260,981	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Banjarbaru	jumlah monev urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	1 Kali	355,260,981	
			Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan terhadap keberadaan anak yatim non lembaga di Kota Banjarbaru	1 Kali				Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan terhadap keberadaan anak yatim non lembaga di Kota Banjarbaru	1 Kali		
			Jumlah silaturahmi pemberdayaan masyarakat	3 Kali				Jumlah silaturahmi pemberdayaan masyarakat	3 Kali		
			Bansos kelompok Masyarakat	1 Tahun				Bansos kelompok Masyarakat	1 Tahun		
Bagian Hukum											
45	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100%	2,990,452,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase naskah produk hukum yang diverifikasi	100%	3,082,932,000	
			Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Perundang-Undangan dan Kebutuhan Masyarakat	100%				Persentase informasi produk hukum yang update	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Banjarbaru	Jumlah raperda yang tersusun	7 Raperda	411,008,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Banjarbaru	persentase penyusunan produk hukum yang terfasilitasi	7 Raperda	453,488,000	
			Evaluasi Perda	7 Perda				Evaluasi Perda	7 Perda		
			Fasilitasi Perwali	15 Perwali				Fasilitasi Perwali	15 Perwali		
			Naskah Akademik	2 Naskah Akademik				Naskah Akademik	2 Naskah Akademik		
47	Fasilitasi Bantuan Hukum	Banjarbaru	Jumlah bantuan hukum yang terfasilitasi	7 Perkara	400,668,750	Fasilitasi Bantuan Hukum	Banjarbaru	persentase bantuan hukum penanganan perkara penda yang terfasilitasi	7 Perkara	450,668,750	
			Ranham dan penilaian kota peduli HAM	1 Kali				Ranham dan penilaian kota peduli HAM	1 Kali		
48	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Banjarbaru	Jumlah pengelolaan dokumentasi produk hukum serta informasi hukum :		2,178,775,250	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Banjarbaru	Jumlah pengelolaan dokumentasi produk hukum serta informasi hukum :		2,178,775,250	
			- Media cetak	5 Jenis				- Media cetak	5 Jenis		
			- Sosialisasi penyuluhan hukum	3 Kali				- Sosialisasi penyuluhan hukum	3 Kali		
			- Pembinaan kadarkum dan kelurahan sadar hukum	3 Kali				- Pembinaan kadarkum dan kelurahan sadar hukum	3 Kali		
			- Website JDIH	1 Website				- persentase produk hukum daerah yang di input dalam JIDH	1 Website		
Bagian Kerjasama dan Keagrariaan											
49	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>		<b>Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>214,726,000</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>		<b>Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>239,726,000</b>	
50	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Banjarbaru	Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	214,726,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Banjarbaru	Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	239,726,000	
51	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase penegasan tata batas wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>418,000,000</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi</b>	<b>100%</b>	<b>647,280,000</b>	
52	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Banjarbaru	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko	20 kali	418,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Banjarbaru	Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko	20 kali	647,280,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen perubahan sertifikat tanah masyarakat yang menghibahkan tanah	10 sertifikat				Jumlah dokumen perubahan sertifikat tanah masyarakat yang menghibahkan tanah	10 sertifikat		
			Pembuatan patok pengamananan tanah	10 buah				Pembuatan patok pengamananan tanah	10 buah		
			Pembuatan papan nama pengamananan tanah	6 buah				Pembuatan papan nama pengamananan tanah	6 buah		
			Persentase penegasan tapal batas antar kabupaten	2 kabupaten				Persentase penegasan tapal batas antar kabupaten	2 kabupaten		
			Persentase penyusunan peta nama rupa bumi	100%				Persentase penyusunan peta nama rupa bumi	100%		
Bagian Perekonomian dan Pembangunan											
53	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase peningkatan kinerja administratif perekonomian	100%	148,405,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	100%	148,405,000	
54	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Banjarbaru	Persentase Kajian Investasi	100%	35,200,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Banjarbaru	Jumlah Monev kebijakan pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	100%	35,200,000	
			Jumlah Evaluasi Monitoring pengelolaan BLUD	11 Laporan				Jumlah Evaluasi Monitoring pengelolaan BLUD	11 Laporan		
55	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Banjarbaru	Jumlah laporan inflasi daerah Kota Banjarbaru	1 Laporan	92,029,400	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Banjarbaru	Jumlah monev pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	1 Laporan	92,029,400	
56	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan dan koordinasi pengawasan ekonomi mikro kecil	1 Dokumen	21,175,600	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Banjarbaru	Jumlah Monev perkembangan UMKM yang dilaksanakan	1 Dokumen	21,175,600	
57	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	32 SKPD	727,443,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi	32 SKPD	727,443,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Jumlah perusahaan dan atau pendonor yang berkontribusi terhadap pembangunan kota</b>	<b>4 Perusahaan</b>				<b>Persentase realisasi program pembangunan yang terverifikasi</b>	<b>4 Perusahaan</b>		
58	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Banjarbaru	Jumlah laporan inflasi Daerah Kota Banjarbaru	1 Laporan	36,351,700	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Banjarbaru	jumlah fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	1 Laporan	36,351,700	
59	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Banjarbaru	Jumlah rakor pengendalian dan evaluasi pembangunan	8 Kali	691,091,300	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Banjarbaru	Jumlah movev pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan	8 Kali	691,091,300	
			Jumlah dokumen dan informasi bahan kebijakan	2 Dokumen				Jumlah dokumen dan informasi bahan kebijakan	2 Dokumen		
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											
60	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa melalui bagian PBJ</b>	<b>100%</b>	<b>152,030,950</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>227,330,950</b>	
61	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Jumlah SKPD yang terkelola dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	34 SKPD	95,895,500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Jumlah pembinaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan	34 SKPD	95,895,500	
62	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Jumlah SKPD yang terlayani dalam bidang pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	34 SKPD	56,135,450	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banjarbaru	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan	34 SKPD	131,435,450	



## 2.5 Penelaahan Usulan Pemangku Kepentingan

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tidak hanya berfungsi memfasilitasi dan mengkoordinasikan kepentingan di lingkup Sekretariat Daerah namun juga ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang kegiatannya berkaitan langsung dengan masyarakat. Usulan pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial</b>	<b>100%</b>	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Banjarbaru	Pelaksanaan peribadatan keagamaan	1 Tahun	
			Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	1 Kegiatan	
			Pelaksanaan Ibadah Haji	2 Kali	
			Pelaksanaan Tali Asih petugas kebersihan rumah ibadah	2 Kali	
			Pelaksanaan Safari/Silaturahmi Ramadhan	6 Kali	
			Petugas masjid Agung Al Munawwarah	1 Tahun	
			Pelaksanaan Takmi Ramadhan	10 Kali	
			Hibah Organisasi Kelompok	1 Tahun	
			Hibah Kelompok Masyarakat	1 Tahun	
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	Jumlah silaturahmi dan pengembangan sosial budaya	2 Kali	
			Pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas netra	54 Kali	
			Jumlah pembinaan dan pengembangan UKS di TK/SD/SMP/SMA/Sederajat	4 Kali	
			Jumlah sosialisasi peraturan, monitoring evaluasi bantuan sosial dan hibah	3 Kegiatan	
			Jumlah sosialisasi peraturan Walikota tentang rukun kematian & bimtek penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah	3 Kegiatan	
			Bansos santunan kematian	1 Tahun	
			Bansos PERTUNI DPC Kota Banjarbaru	1 Tahun	
			Hibah kelompok masyarakat	1 Tahun	
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah evaluasi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi	1 Kali	
			Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan terhadap keberadaan anak yatim non lembaga di Kota Banjarbaru	1 Kali	
			Jumlah silaturahmi pemberdayaan masyarakat	3 Kali	
			Bansos kelompok Masyarakat	1 Tahun	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan rencana kerja maupun rencana strategis, tahun 2022 ini pemerintah daerah pada khususnya masih berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024, yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN 2020-2024 memiliki prinsip dasar membangun kemandirian, menjamin keadilan dan menjaga keberlanjutan. Sebagaimana diuraikan, sebagai modal pembangunan perlu adanya sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi. Selain itu, dalam mewujudkan kemandirian bangsa perlu adanya penguasaan atas IPTEK untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan. Dalam prinsip dasar juga diuraikan bahwa harus adanya keterjaminan akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan.

Pada tahun 2022, Indonesia masih berada pada masa pandemi covid-19. Atas terjadinya pandemi dilakukan penyesuaian anggaran pembangunan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat;

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah;
2. Meningkatnya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
4. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan SAKIP / RB SKPD;
5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;

6. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat;
7. Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik SKPD;
9. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian;
10. Meningkatnya tindak lanjut pengendalian pengelolaan administrasi pembangunan;
11. Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru antara lain :

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

##### **4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

##### **5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### **6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
  - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 10. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
  - Fasilitas Keprotokolan
  - Fasilitas Komunikasi Pimpinan
  - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 11. Kegiatan Penataan Organisasi**
  - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

## **II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**
  - Penataan Administrasi Pemerintahan
  - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
  - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah**
  - Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri
- 3. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

#### **4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

### **III. Program Perekonomian dan Pembangunan**

#### **1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

#### **2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

#### **3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah sebagai berikut :

4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 95.077.000
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 18.070.000
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 77.007.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 12.936.520.893
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 12.884.459.543;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 26.030.600;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 26.030.750
3. Administrasi Keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 748.364.977
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 195.475.000
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 195.475.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 7.523.008.723
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 1.116.321.223;
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.152.497.500;
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 236.250.000;
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.017.940.000
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 486.416.000

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 486.416.000;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 4.548.723.300
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 1.950.895.800;
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 2.597.827.500;
8. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.494.846.354
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 301.345.800;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 855.302.554;
  - c. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 12.600.000;
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 312.268.000
  - e. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 1.013.330.000
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000
  - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp 180.000.000
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp 3.279.582.500
  - a. Fasilitasi Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp 2.251.659.500;
  - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp 551.602.000;
  - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp 476.321.000
11. Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp 819.239.000
  - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 317.253.750;
  - b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp 204.997.500
  - c. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp 296.987.750;

12. Administrasi Tata Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 894.906.200
  - a. Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 555.018.000;
  - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp 207.375.000;
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp 132.513.200
13. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan anggaran sebesar Rp 225.462.250
  - a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp 225.462.250
14. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp 6.352.305.350
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan anggaran sebesar Rp 2.127.607.200;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp 3.034.207.500;
  - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 1.190.490.750
15. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp 1.163.461.550
  - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan anggaran sebesar Rp 431.558.300;
  - b. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp 228.771.250;
  - c. Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp 503.132.000;
16. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp 204.816.850
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan anggaran sebesar Rp 85.951.850;
  - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp 96.630.750;
  - c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan anggaran sebesar Rp 22.234.250
17. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 763.815.000
  - a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 38.169.250;
  - b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 725.645.750
18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 294.164.250
  - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 100.690.250;



- b. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 58.942.000;
- c. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 134.532.000.

## **BAB V PENUTUP**

Renja SKPD sebagaimana telah diketahui sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2022, diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2022.

# LAMPIRAN